

PERILAKU ‘LOMPAT PAGAR’ POLITISI MENJELANG PEMILU LEGISLATIF 2014 DI JAWA TENGAH

Shabrina Hana Mutiara Negara (14010114140108)

Email: shabrina.kyumin@gmail.com

Dosen Pembimbing: Dr. Nur Hidayat Sardini, S.Sos., M.Si.

Email: nhsardini@gmail.com

**Departemen Politik dan Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro**

ABSTRAKSI

Pemilu legislatif tahun 2014 sudah diwarnai oleh perpindahan kader partai ke partai lain. Fenomena ini seperti yang dilakukan oleh sejumlah partai yang ada di Jawa Tengah. Dari penelusuran data yang ada, tidak ada nilai pasti dari berapa jumlah para kader yang melakukan perpindahan partai yang dimaksud. Namun dari penelusuran penulis terdapat dua kader, yang pertama yaitu Drs. Fadholi, beliau terpilih menjadi Anggota DPR-RI periode 2014-2019 dari Partai Nasional Demokrat (Nasdem). Berikutnya, Nur Hadi semula kader Partai Kebangkitan Nahdlatul Ulama, berpindah ke Partai Persatuan Pembangunan Kota Pekalongan.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan metode penelitian deskriptif kualitatif yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan induktif. Dalam pengambilan data yang dilakukan dengan menggunakan metode wawancara mendalam dan dokumentasi. Wawancara dilakukan di kediaman kedua narasumber di Kota Salatiga dan Kota Pekalongan.

Hasil penelitian menunjukkan fenomena politisi pindah partai di Kabupaten Pekalongan dan Kota Salatiga merupakan suatu realitas politik yang lumrah dalam kancah perpolitikan Indonesia, dikarenakan banyaknya motif dari para politisi. Maraknya politisi pindah partai dilatar belakangi oleh buramnya ideologi partai politik, gagalnya partai politik dalam melakukan pendidikan politik, serta sistem pengkaderan yang tidak efektif. Partai politik kurang mapan dalam fungsi kaderisasi sehingga kader dalam aktivitas politiknya tidak menjiwai ideologi partai, sehingga mengarah pada pragmatisme politik yang dilakukan politisi. Selain motif pragmatisme, diketahui pula terdapat motif agar politisi dapat mempertahankan eksistensi dalam Pemilu dengan berpindah partai.

Saran dari penulis adalah perlu adanya revitalisasi secara komprehensif partai politik dalam aktivitas politiknya, Partai politik harus mengembalikan kitalah perjuangannya sebagai jembatan dalam menyampaikan aspirasi rakyat.

Kata Kunci : Perilaku Politisi, Pemilu Legislatif 2014

**POLITICAL BEHAVIOR OF MOVING PARTIES APPROACHING 2014
LEGISLATIVE ELECTIONS IN CENTRAL JAVA**

Shabrina Hana Mutiara Negara
Shabrina.kyumin@gmail.com

Supervisor: Dr. Nur Hidayat Sardini, S.Sos., M.Si.
Email: nhsardini@gmail.com

Department of Politics and Government FISIP Undip Semarang

ABSTRACT

The 2014 legislative elections have been marked by the transfer of party cadres to other parties. This phenomenon is like that carried out by a number of parties in Central Java. From the data search, there is no exact value of the number of cadres who carry out the party movement in question. But from the writer's search there were two cadres, the first being Drs. Fadholi, he was elected as a Member of the House of Representatives of the 2014-2019 period from the Democratic National Party (Nasdem). Next, Nur Hadi was originally a cadre of the PKNU, moving to the PPP Pekalongan City.

This research is a field research with descriptive qualitative research methods that are descriptive and tend to use analysis with an inductive approach. In data retrieval carried out by using the method of in-depth interviews and documentation. Interviews were conducted at the residence of the two informants in Salatiga City and Pekalongan City.

The results of the research show that the phenomenon of politicians moving parties in Pekalongan Regency and Salatiga City is a normal political reality in the Indonesian political arena, due to the many motives of politicians. The rise of politicians moving parties is motivated by the blurred ideology of political parties, the failure of political parties in conducting political education, and ineffective cadre system. Political parties are not well established in the function of regeneration so that cadres in their political activities do not animate party ideology, thus leading to political pragmatism by politicians. In addition to the motives of pragmatism, it is also known that there are motives so that politicians can maintain their existence in elections by moving parties.

The suggestion from the author is the need for a comprehensive revitalization of political parties in their political activities, political parties must restore their struggle as a bridge in conveying people's aspirations.

Keywords: Political Behavior, Legislative Elections 2014

A. PENDAHULUAN

Dalam sebuah negara demokrasi, Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan salah satu pilar utama dari sebuah proses akumulasi kehendak masyarakat. Pemilu sekaligus merupakan prosedur demokrasi untuk memilih pemimpin. Diyakini pada sebagian besar masyarakat beradab di muka bumi ini, Pemilu adalah mekanisme pergantian kekuasaan (suksesi) yang paling aman, bila dibandingkan dengan cara lain. Sudah barang pasti bila dikatakan, Pemilu merupakan pilar utama dari sebuah demokrasi.¹

Fenomena politisi yang berpindah dari satu partai ke partai politik lain atau biasa disebut ‘lompat pagar’, dan bukan hal yang baru dalam dunia politik di Indonesia. Ada banyak alasan yang mendasari mengapa para kader partai berpindah menjadi kader partai lainnya. Satu kenyataan bahwa faktor yang mendorong berpindahnya seseorang dari satu partai ke partai lain akibat dari oportunistik yang melekat. Namun pada saat bersamaan, para kader yang karena alasan-alasan tertentu berpindah menjadi kader partai politik yang lain. Alasan tertentu yang dimaksud akibat

penerapan kebijakan Pemilu sebelumnya (*electoral threshold*) yang mengharuskan yang bersangkutan berpindah dalam rangka melanjutkan karir politiknya. Fenomena politik juga menunjukkan seseorang yang berpindah ke partai lain terlibat konflik internal yang membuat seseorang kader tidak lagi merasa nyaman atau adanya perubahan orientasi politik visi dan misi di dalam partai tersebut sehingga mendorong untuk berpindah.

Praktik perpindahan kader tersebut pada akhirnya memunculkan pertanyaan mengenai loyalitas dan ideologi politik yang dianut, karena belum tentu Parpol baru yang ia masuki memiliki kesamaan ideologi. Keputusan untuk berpindah Parpol menimbulkan kesan hanyalah untuk kepentingan diri sendiri atau bisa dikatakan langkah cepat dalam memuluskan karir politiknya dalam meraih kekuasaan.

Pemilu legislatif tahun 2014 sudah diwarnai oleh perpindahan kader partai ke partai lain. Fenomena ini seperti yang dilakukan oleh sejumlah partai yang ada di Jawa Tengah. Dari penelusuran data yang ada, tidak ada nilai pasti dari berapa jumlah para kader yang melakukan perpindahan partai yang dimaksud. Namun dari penelusuran penulis terdapat tiga kader, yang pertama yaitu Drs. Fadholi, beliau terpilih menjadi Anggota DPR-RI periode

¹ Nur Hidayat Sardini, *Restorasi Penyelenggaraan Pemilu di Indonesia*, Fajar Media Press, Yogyakarta, 2011, hlm. 1.

2014-2019 dari Partai Nasional Demokrat (Nasdem) mewakili Dapil Jawa Tengah I setelah memperoleh 41,185 suara. Berikutnya, Nur Hadi semula kader Partai Kebangkitan Nahdlatul Ulama, berpindah ke Partai Persatuan Pembangunan Kota Pekalongan.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) adapun dalam penulisan tesis ini jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian deskriptif kualitatif. Metode kualitatif dianggap paling sesuai untuk penelitian ini. Penelitian kualitatif ini merupakan riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan induktif.

C. PEMBAHASAN

Kronologi

Fadholi terpilih menjadi Anggota DPR-RI periode 2014-2019 dari Partai Nasional Demokrat (Nasdem) mewakili Dapil Jawa Tengah I setelah memperoleh 41,185 suara. Fadholi lahir di Kendal pada tanggal 21 Januari 1960. Fadholi adalah tokoh dan pengusaha konstruksi dari Salatiga. Sebelum bergabung Nasdem, Fadholi adalah kader dari Partai Golongan Karya (Golkar) dan menjabat sebagai Ketua

Dewan Pimpinan Daerah Golkar Salatiga (2005-2006).

Persamaan dan Perbedaan Kedua Kader

Pada kedua kasus perpindahan partai antara Fadholi dan Nur Hadi, terdapat beberapa perbedaan yang mendasari perpindahan partai yang dilakukan keduanya. Fadholi yang kala itu berpindah dari Partai Golkar menuju Partai Nasdem, melakukan perpindahan partai karena terjadi perpecahan kubu dalam internal Golkar. Seharusnya bisa saja Fadholi tetap bertahan dalam partai Golkar yang membesarkannya namun Fadholi memilih untuk merintis partai yang baru bersama Surya Paloh. Namun, meski Fadholi melakukan perpindahan partai, masyarakat tetap memberikan suara untuk Fadholi sehingga Fadholi tetap menjabat meski melakukan perpindahan partai. Dalam hal ini terdapat unsur kepemimpinan karismatik yang dilakukan oleh Fadholi sebagai tokoh masyarakat, sehingga meski perpindahan partai identik dengan hal yang tabu dalam dunia politik, namun Fadholi secara pribadi memperoleh suara yang bertambah. Hal ini membuktikan bahwa masyarakat masih menaruh kepercayaan terhadap Fadholi.

Fenomena perpindahan partai yang dilakukan oleh Nur Hadi dari PKB ke PKNU juga terdapat kemiripan dengan apa yang dilakukan oleh Fadholi. Nur Hadi

memilih untuk merintis PKNU dan berpindah dari PKB. Namun perlu diketahui bahwa ketika Nur Hadi berkarir bersama PKB, menurutnya pengabdianya terhadap PKB tidak terlalu dihargai ketika Nur Hadi melakukan pencalonan pada Pemilu 2004. Perpindahannya yang kedua menunjukkan bahwa Nur Hadi terpaksa melakukan perpindahan partai dikarenakan PKNU tidak lolos dalam verifikasi nasional untuk Pemilu 2014, sehingga Nur Hadi berpindah ke PPP. Nur Hadi menuturkan bahwa dia tidak akan melakukan perpindahan partai seandainya PKNU dapat lolos dalam Pemilu 2014. Hal ini menunjukkan bahwa Nur Hadi benar-benar setia bersama PKNU. Perolehan suara yang diperolehnya juga menunjukkan adanya peningkatan termasuk dalam Pemilu 2019, suara yang diperolehnya meningkat meski terdapat konflik dalam internal PPP.

Motif Politisi Pindah Partai

Pada sub pembahasan ini diuraikan temuan data lapangan berdasarkan hasil dari wawancara terhadap informan terkait Nur Hadi, kader atau politisi dari partai PKB berpindah ke PKNU dan pindah lagi ke PPP di Kabupaten Pekalongan dan Fadholi, kader partai Golkar yang berpindah ke partai Nasdem, terkait dengan fokus permasalahan tentang motif politisi “lompat pagar”. Sebelum membahas kedua

aspek tersebut, perlu dijelaskan lebih awal mengenai salah satu fungsi partai politik yaitu rekrutmen politik, sebab akar persoalan mengenai fenomena politisi “lompat pagar” tidak terlepas dari mekanisme internal partai yang bersangkutan.

Motif Kekuasaan

Kekuasaan dipandang sebagai gejala yang selalu terdapat dalam proses politik, bahkan Surbakti menyatakan bahwa politik tanpa kekuasaan bagaikan agama tanpa moral. Dalam dunia politik, mendapatkan kekuasaan adalah tujuan bagi para aktor politik. Namun dominasi perilaku aktor politik dewasa ini menunjukkan terjadinya pergeseran orientasi dari yang semula didasari orientasi ideologis menjadi pragmatis yakni untuk memperoleh kekuasaan dan menggunakannya untuk kepentingan kelompoknya sendiri.

Dalam konteks inilah penting untuk menganalisa motif “lompat pagar” dari satu partai ke partai yang lain dalam rangka memenuhi tujuan-tujuan individualnya maupun tujuan kolektif yang tercermin dalam perilaku koalisi lintas kader partai. Berkenaan dengan objek/subjek penelitian ini, dalam Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD di Kabupaten Pekalongan Tahun 2014, terdapat 9 (Sembilan) partai politik yang ikut terlibat dalam

penyelenggaraan Pemilu Legislatif, antara lain PKB, PDIP, Golkar, Gerindra, PAN, PPP, Nasdem, PKS, dan Hanura. Masing-masing partai tersebut mengusung calonnya untuk dipilih menjadi Anggota DPRD Kabupaten/Kota yang tersebar di 7 (tujuh) Daerah Pemilihan (dapil) Kabupaten Pekalongan.

Sehubungan dengan pemetaan partai yang terlibat dalam penyelenggaraan Pemilu Legislatif 2014 Kabupaten Pekalongan, politisi yang kemudian menjadi informan penelitian ini adalah anggota partai PKB yang notabene pindah ke partai PKNU dan anggota partai PKNU yang berpindah ke partai PPP. Berdasarkan hasil wawancara terhadap politisi PPP Kabupaten Pekalongan, diketahui beberapa motif yang menjadi alasan mereka mengambil keputusan untuk berpindah partai. Salah satu alasan yang mengemuka diungkapkan oleh politisi PPP, yang menyatakan ketidakadilan partai memiliki titik lemah sehingga cenderung menjadi pemicu bagi anggota untuk berpindah partai. Hal ini seperti yang dikemukakan oleh Politisi PPP, Nurhadi:

Ada masalah administrasi karena kurangnya kejujuran dengan masalah keuangan. Karena masalah tersebut saya keluar dari PKB. Tidak hanya itu, Saya

juga dinakali oleh PKB. Saya merupakan anggota dewan terlama di PKB dan mengabdikan di PKB mulai dari nol. Seharusnya Saya mendapatkan No.urut 2 karena pegabdiannya, namun Saya dijadikan No.urut.3. saya kecewa dengan system PKB lalu memutuskan untuk pindah.

Pendapat yang dikemukakan oleh politisi PPP tersebut, mengindikasikan bahwa kader-kader partai politik menginginkan keadilan terhadap kontribusinya atas loyalitas kepada partainya. Informan ini bermaksud mengkritisi perilaku politik para kader partai yang realitanya tidak aktif terhadap kegiatan partainya namun mendapatkan urutan yang lebih tinggi dari kader partai yang aktif. Sebab latar persepsi ini, kemudian menjadi alasan bagi politisi yang sebelumnya menjadi anggota partai PKB berpindah ke partai PKNU. Dalam kasus perpindahan politisi ini, dapat dikatakan bahwa partai PKB belum mampu menciptakan konsolidasi di internal kader-kadernya sehingga mau berkomitmen dan konsisten terhadap loyalitas kadernya.

Motif Ekonomi

Selain motif kekuasaan/jabatan, politisi pindah partai juga didasari oleh motif ekonomi. Dari hasil analisis ditemukan setidaknya tiga kategori umum pada motif ini, pertama, politisi pindah

partai karena membutuhkan sumber daya ekonomi yang besar untuk menopang pergerakan politik mereka. Politisi pada tipe ini terutama mengincar partai-partai besar yang memang secara finansial mampu membiayai kader-kadernya dalam proses kampanye pemilu/pileg yang memang membutuhkan biaya yang relatif besar. Kedua, politisi pindah partai karena ingin memanfaatkan beragam peluang dan beragam kepentingan untuk kepentingan pribadinya. Politisi pada tipe ini relatif memiliki modal ekonomi yang kuat sehingga berpindah partai sejauh partai itu mampu memberikan peluang bagi dirinya untuk mendapat nomor urut teratas atau nomor urut jadi.

Ketiga, politisi pindah partai karena murni kepentingan mencari keuntungan finansial yang lebih besar. Berpolitik bagi mereka seperti perdagangan yang sarat dengan hukum ekonomi. Mereka meyakini dengan menggelontorkan modal besar dalam penjualan akan mendapatkan keuntungan yang besar pula. Politisi seperti ini sudah menghitung kapan waktunya untung dalam berpolitik, sehingga menjelajah dari satu partai ke partai lain yang dianggap dapat mendukung tujuan ekonomi-politiknya, salah satunya untuk mengembangkan sayap bisnisnya.

Pada kenyataannya, terdapat indikasi bahwa beberapa politisi pindah partai dengan motif ekonomi khususnya pada Pemilihan Legislatif Kabupaten Pekalongan Tahun 2014. Dikaitkan dengan ketiga kategori sebelumnya, maka motif ekonomi yang terjadi pada kasus politisi Golkar pindah ke Nasdem (Fadholi) dan politisi PKNU pindah ke PPP (Nurhadi), berada pada kategori pertama, yakni perpindahan mereka karena kepentingan sumber daya ekonomi yang besar untuk menopang proses kampanye pileg yang memang dijanjikan oleh kedua partai tersebut (Nasdem dan PPP).

Partai Nasdem misalnya sebagai satu-satunya partai parpol baru calon peserta pemilu 2014, mengumbar janji dukungan logistik kampanye kepada para caleg sedikitnya bernilai antara Rp 5 miliar hingga Rp 10 miliar. Kenyataan ini tentunya menjadi daya tarik tersendiri bagi Nasdem untuk merekrut kaderan politisi berpengalaman dari parpol lain untuk pindah ke Nasdem. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Fadholi yang sebelumnya adalah kader Golkar kemudian pindah ke partai Nasdem karena motif ekonomi:

Partai Nasdem saat pileg 2014 memang gencar-gencarnya merekrut caleg-caleg berpengalaman dengan janji akan memberi modal Rp 5-10 miliar untuk

keperluan logistic kampanye para calegnya. Saat pemilu legislatif 2014, memang banyak yang pindah ke Nasdem, termasuk saya sendiri. Harus diakui biaya kampanye pileg itu memang kita butuh biaya besar, nah yang Nasdem lakukan adalah support biaya dan fasilitas untuk caleg, supaya kita bisa optimal sebagai perangkat pemenangan partai dalam Pemilu Legislatif.

Berdasarkan keterangan informan tersebut, diketahui bahwa menjelang Pemilihan legislatif di Kabupaten Pekalongan Tahun 2014, Nasdem menjalin komunikasi dengan pihak-pihak yang potensial untuk direkrut menjadi caleg Nasdem. Selain kader dari parpol lain, Nasdem juga intensif menjaring caleg dari berbagai latar belakang yang belum bergabung dalam parpol manapun. Peluang yang diberikan oleh Nasdem ini tentunya dimanfaatkan oleh sejumlah politisi terutama yang terkendala dengan biaya kampanye, sehingga partai yang lemah dari sisi anggaran kampanye pun sangat berpotensi ditinggalkan oleh kadernya.

Selain karena tingginya biaya kampanye yang harus dikeluarkan oleh politisi caleg, mereka juga menghabiskan banyak uang untuk melakukan survey, penasehat politik, dan iklan di media massa. Tingginya biaya politik ini akhirnya

mendorong para politisi yang lemah ekonomi untuk mencari dana dari berbagai sumber yang ada, termasuk mengincar partai-partai yang kuat anggarannya. Namun tidak dipungkiri juga, pada banyak kasus sumber anggaran partai menjadi sangat tergantung pada donatur privat yang kaya raya sehingga ada kemungkinan para investor atau pemodal itu dapat memengaruhi jalannya proses politik sesuai kepentingan pribadinya.

Besarnya pengaruh uang di dalam politik membuka peluang bagi pihak-pihak tertentu untuk dapat memenuhi segala kepentingan mereka dengan memberikan sejumlah uang kepada para politisi. Meskipun, harus diakui, banyak pengusaha yang memberikan donasi politik kepada partai/politisi atas dasar ideologi, tetapi banyak pula pengusaha yang memberikan donasi dengan pamrih tertentu terlepas dari program dan ideologi yang diusung partai/politisi, sehingga sang pengusaha tetap memiliki “saham” pada kandidat manapun yang akhirnya memenangi pemilu. persoalan lain terkait ekonomi politik adalah ketika partai atau kandidat politik tidak memiliki kesempatan yang setara terhadap akses pendanaan.

Motif Keterpilihan dalam Pileg

Pada kedua kasus politisi yang dianalisa, menunjukkan adanya

kecenderungan di balik perpindahan mereka ke partai lain, karena posisi tawar partai baru yang akan dimasuki lebih mampu memenuhi tuntutan mereka terutama untuk meraih jabatan structural yang strategis dalam partai maupun ketika mereka mencalonkan diri sebagai peserta pemilu (calon legislatif).

Politisi Nurhadi misalnya, yang tadinya merupakan kader PKNU kemudian memutuskan pindah partai, karena PPP memiliki basis massa atau konstituen terbanyak. Seperti halnya diprediksi oleh banyak pihak termasuk paparan data lembaga survey dan rilis beberapa media, akan meraih kemenangan pada Pemilu Legislatif 2014 atau menjadi partai dengan pemilih terbesar. Gejala ini tentu saja memengaruhi sebagian politisi untuk berpindah partai dengan ekspektasi tingkat keterpilihan mereka pada Pileg 2014 lebih besar. Terkait dengan hal ini, Nurhadi mengemukakan :

Saya pindah dari PKNU ke PPP dikarenakan PKNU tidak lolos verifikasi, oleh karena itu saya pindah ke partai memiliki ideology yang sama dengan partai lama saya namun memiliki basis massa yang lebih besar, dimana PPP merupakan partai lama yang memungkinkan memiliki suara yang besar.

Berdasarkan keterangan informan tersebut, dapat dilihat bahwa motif perpindahan partai seorang politisi erat kaitannya dengan perhitungan tingkat keterpilihan mereka pada momentum Pemilu Legislatif 2014. Karena motif inilah sehingga posisi partai menjadi sangat signifikan bagi politisi yang akan maju dalam Pileg. Namun demikian, perpindahan Nurhadi dari PKNU ke PPP tidak serta merta terjadi. Secara individual motif politisi juga disebabkan tuntutan pragmatisme politik dari kader di satu sisi, dan faktor kelemahan serta rapuhnya sistem kaderisasi diinternal partai di sisi yang lain. Diterimanya Nurhadi sebagai anggota baru dalam partai PPP memiliki beragam pertimbangan, terutama perpindahan itu menjelang penyelenggaraan Pemilu Legislatif 2014. Berkenaan dengan hal tersebut, politisi PPP Nurhadi dalam wawancara mengemukakan sebagai berikut :

Saya merupakan sekertaris DPC pada saat di PKNU, tugas saya seperti mempersiapkan verifikasi keikutsertaan partai dalam pemilu dan mengikuti pertemuan anggota. Di PPP saya menjadi wakil ketua di bagian kepemimpinan/leadership termasuk pemenang pemilu, LKK, dan kader kepemimpinan. Setiap sebulan sekali beliau

mengikuti pertemuan DPC di PPP. *Saya memiliki keyakinan bahwa PPP memiliki suara yang besar, maka saya tidak mempermasalahkannya.*

Keterangan wawancara tersebut di atas menunjukkan bahwa politisi ini memiliki posisi tawar yang tinggi sebagai calon legislatif, yakni basis massa pendukung yang riil di daerah, sehingga tidak mengherankan jika partai (PPP) memberikan peluang serta dukungan sumber daya politik kepada politisi tersebut untuk maju bertarung di Pemilu Legislatif 2014. Dalam konteks inilah tampak kecenderungan adanya tawar-menawar yang menguntungkan secara timbal-balik (simbiosis mutualisme) kedua pihak. Politisi tentu membutuhkan kendaraan politik, sementara partai juga membutuhkan figure yang mampu meraih kursi legislatif.

Dengan menggunakan partai politik, politisi tidak lagi bekerja sendiri, tetapi juga dibantu oleh kekuatan sumber daya partai. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh politisi dari Nasdem, Fadholi, yang menyatakan bahwa partai memberikan dukungan kepada kader yang mencalonkan diri sebagai calon legislatif pada Pemilihan Legislatif 2014 di Kabupaten Pekalongan :

Kalau jadi caleg di Nasdem diberi fasilitas bukan berupa dana melainkan

instrument sosialisasi dan kampanye, berupa baju kaos, poster, spanduk, walaupun ada dalam bentuk dana yang diberikan kepada caleg hanya uang saksi waktu pemilu yang ditiat TPSnya diharuskan ada dua saksi.

Didasarkan pada keterangan wawancara di atas, tampak sebuah bargaining politik antara politisi dengan partai, dimana keduanya saling mendukung satu sama lain untuk mencapai tujuan kemenangan di Pemilu Legislatif 2014. Fakta menarik yang diungkapkan informan tersebut, adalah kecenderungan partai melakukan perekrutan (politisi) dalam rangka memperluas jaringan politik. Karena itu, tidak mengherankan fenomena politisi pindah partai semakin marak terjadi dalam momentum Pemilihan Legislatif, sebab partai politik senantiasa memberikan ruang bagi siapa saja yang berkeinginan menjadi calon legislatif dengan pertimbangan kuantitatif seberapa besar kemampuannya meraih suara rakyat. Kualitas personal politisi pun menjadi taruhannya, di mana mekanisme rekrutmen calon legislatif oleh partai yang serba instan itu sering mengabaikan dimensi integritas dan kapabilitas personal politisi.

Motif Pragmatis

Jika dianalisis berdasarkan data empiris, maka teori pilihan rasional tersebut lebih tampak menggambarkan sisi pragmatisme politik dalam konteks perilaku para politisi. Perpindahan politisi dari satu partai ke partai yang lain tentunya memiliki tujuan pragmatis, salah satu di antaranya meraih kekuasaan aktual yakni menduduki jabatan politik atau kursi pemerintahan. Politisi yang hendak mencari kekuasaan itu akan mempertimbangkan sumber daya politik, dalam konteks ini partai politik sebagai instrumennya. Dari sini dapat diidentifikasi rasionalitas politik para politisi sehingga ia konsisten bertahan berjuang di suatu partai, atau sebaliknya berpindah ke partai yang dianggap lebih potensial.

Berdasarkan temuan data lapangan, diketahui motif rasional perpindahan partai dari politisi Partai Nasdem yang sebelumnya berkarir di Golkar. Kader Partai Nasdem, Fadholi, menilai bahwa partisipasi politik dan dedikasinya selama berkarir di Golkar kurang diapresiasi. Hal ini menyebabkan pergeseran orientasi politik dari “idealisme” menuju “pragmatisme”, dimana Fadholi beranggapan bahwa pergerakan politiknya terhambat karena partainya cenderung eksklusif (tertutup), sementara perjuangannya membesarkan partai kurang

mendapatkan imbalan, baik posisi yang strategis di struktur partai maupun dalam hal dukungan terhadap kader untuk ikut berkompetisi pemilu :

Saya pindah ke Partai Nasdem karena Golkar sangat eksklusif, banyak syarat yang membatasi hak saya untuk ikut serta di pemilu legislatif. Selama ini saya telah memperjuangkan kebesaran dan kejayaan Golkar di Kab. Pekalongan, tapi tidak ditempatkan di posisi strategis dalam struktur Partai Golkar. Wajar kalau timbul rasa kecewa terhadap partai ini, dedikasi saya terasa sia-sia karena tidak sesuai dengan imbalan yang diberikan partai politik. Bedanya kalau di Nasdem, mekanisme rekrutasinya agak longgar untuk mengisi jabatan di struktur partai dikarenakan Nasdem yang merupakan partai baru, Nasdem juga mendukung saya untuk mencalonkan diri sebagai calon legislatif 2014.

Tuntutan individual setiap kader dalam partai politik adalah suatu keniscayaan, meskipun ada sebagian kader yang menang berpartisipasi politik secara suka rela tanpa menuntut imbalan apa pun. Inilah problem yang umumnya dihadapi oleh partai berbasis kader, karena anggota-anggotanya dituntut memiliki jiwa pengabdian yang tinggi dengan mekanisme peraturan organisasi yang sangat ketat.

Sementara faktanya tidak semua kader yang masuk dalam sebuah partai memiliki loyalitas dan dedikasi yang tinggi, melainkan ada kepentingan personal yang lebih pragmatis dibandingkan sekedar memperjuangkan idealitas organisasi politik.

Fenomena yang tampak sama juga terjadi pada politisi PPP yang dahulu berkarir di PKNU dan PKB. Nurhadi yang kini menduduki jabatan sebagai Wakil Ketua bidang Kepemimpinan DPC PPP Kabupaten Pekalongan, beranggapan bahwa karirnya kurang baik dalam prospek politik jangka panjang, mengingat kedudukannya hanya sebagai anggota biasa atau tidak dalam posisi strategis dalam struktur partai.

Saat di PKNU, saya sendirian menjadi dewan yang membuatnya serba salah mengurus kegiatan partai, saat di PPP, hanya masalah dari pusat seperti yang diterangkan di atas yang membuat suara PPP di Pekalongan turun drastis. Namun suara untuk pencalonan tidak ada kendala.

Pada contoh kedua kasus politisi berpindah partai tersebut, dapat dilihat adanya pergeseran orientasi politik, baik pada level ideologi maupun pada aspek rasionalitas tindakan politik kader partai. Pada kenyataannya, partai yang bertipikal pragmatis memiliki daya tarik yang

memikat, sehingga mampu memengaruhi kader-kader dari partai lain untuk berpindah partai. Partai kader yang sangat ideologis dan eksklusif dalam hal ini dianggap tidak mampu memenuhi tuntutan kadernya sendiri. Meskipun kapabilitas, loyalitas dan dedikasi kader telah ditunjukkan, namun tidak menjamin seorang politisi dapat menduduki posisi yang strategis dalam struktur partai politik atau dukungan untuk berkompetisi di pemilu.

D. PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya, maka pada bab ini penulis akan menguraikan kesimpulan dan saran yang relevan dengan masalah penelitian. Pertama, kesimpulan yang berisi uraian singkat dari hasil penelitian mengenai motif politisi berpindah partai.

1. Fenomena politisi pindah partai di Kabupaten Pekalongan merupakan suatu realitas politik yang lumrah dalam kancah perpolitikan Indonesia, dikarenakan banyaknya motif dari para politisi. Hal ini sebagai wujud kemunduran demokrasi politik di Indonesia.

2. Maraknya politisi pindah partai khususnya di Kabupaten Pekalongan dilatarbelakangi oleh buramnya ideologi

partai politik, gagalnya partai politik dalam melakukan pendidikan politik, serta sistem pengkaderan yang tidak efektif. Partai politik kurang mapan dalam fungsi kaderisasi sehingga kader dalam aktivitas politiknya tidak menjiwai ideologi partai.

Saran

1. Perlu adanya revitalisasi secara komprehensif partai politik dalam aktivitas politiknya, partai politik harus mengembalikan kitalah perjuangannya sebagai jembatan dalam menyampaikan aspirasi rakyat.

2. Masyarakat harus berperan secara aktif dalam mengawasi aktivitas partai politik.

3. Perlu adanya reformasi struktural dan sistem pengkaderan partai politik. Partai politik bukan hanya sebagai jembatan menuju kekuasaan namun parpol harus mampu mendidik dan membentuk karakter kadernya. Mekanisme perekrutan partai politik harus dilakukan secara filter, terbuka serta melibatkan elemen lain seperti, akademisi, tokoh agama, dan para tokoh adat/masyarakat.

Perlu adanya revisi Undang-undang partai politik, dalam hal ini kader partai politik yang tersangkut korupsi maka sanksi bukan hanya diberikan terhadap oknum namun juga terhadap institusi parpol.

Daftar Pustaka

Nur Hidayat Sardini, *Restorasi Penyelenggaraan Pemilu di Indonesia*, Fajar Media Press, Yogyakarta, 2011.